

# MELIHAT UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI UNIVERSITAS PANCASILA MELALUI KHAZANAH ARSIP

*Kurniatun<sup>1</sup>*

Jati diri Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan dan Universitas Pusat Kebudayaan. Salah satu jati diri UGM sebagai Universitas Pancasila, yaitu:

“Universitas yang menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kiprah penelitian (mengungkap kenyataan dan kebenaran, objektivitas dan universalitas ilmu pengetahuan), pendidikan/pengajaran dan pengabdian pada masyarakat, selaras dan senafas dengan nilai-nilai Pancasila (Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 19/SK/MWA/2006).”



Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 19/SK/MWA/2006

Secara fisik UGM juga menggunakan nama Pancasila untuk salah satu jalan di lingkungan kampus. Pada saat kita memasuki kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) melewati pintu gerbang utama tentu kita akan melewati jalan Pancasila. Bisa jadi itu merupakan salah satu cara UGM untuk menunjukkan bahwa UGM merupakan “Universitas Pancasila”. Ditambah juga dengan berdirinya Pusat Studi Pancasila yang dibentuk berdasar Surat Keputusan Rektor UGM Nomor: UGM/87/3966/UM/01/37. Selain dari segi fisik, kiprah UGM sebagai universitas Pancasila bisa dilihat dari beberapa khazanah arsip yang tersimpan di Arsip UGM.



Foto Gedung Pusat UGM dengan latar belakang Gunung Merapi dilihat dari Jl. Pancasila dan deretan pohon cemara di kanan dan kiri jalan (AF.IP.IG.1960an.1B).

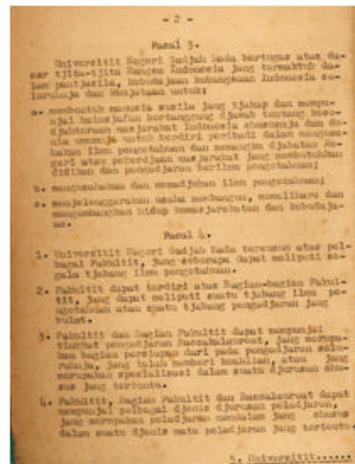
<sup>1</sup> *Arsiparis Arsip UGM*



SK Pendirian Pusat Studi Pancasila berdasarkan Keputusan Rektor UGM Nomor: UGM/87/3966/UM/01/37

### Era 1950-1990

Pada awal pendiriannya, UGM sudah menekankan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan kampus. Hal ini tercantum dalam statuta UGM yang pertama, yaitu di Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitas Negeri Gadjah Mada. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Universitas Negeri Gadjah Mada bertugas atas dasar cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila, kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnya.



Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitas Negeri Gadjah Mada

Kegiatan monumental pertama di UGM yang mengangkat tema Pancasila diawali oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro. Pada tanggal 19 September 1951, Prof. Mr. Drs. Notonagoro selaku Sekretaris Senat Universitas dan Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, menyampaikan pidato pada Promosi *Honoris Causa* (HC) P.J.M. Ir. Soekarno, Presiden RI dalam Ilmu Hukum. Pidato ini kemudian diterbitkan dengan judul Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Pertama, Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Prof. Mr. Drs. Notonagoro menyampaikan antara lain:

1. Pancasila dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara dari Republik Indonesia, terlepas dari

susunan kata-kata tertentu dalam sebuah Undang-Undang Dasar.

2. Salah satu perwujudan Pancasila ialah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bahwa Pancasila merupakan dasar daripada pendidikan dan pengajaran serta usaha pengetahuan, yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, yang dalam pasal 4 menentukan bahwa pendidikan dan pengajaran di sekolah berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, sedangkan untuk Universitas Negeri Gadjah Mada dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950.
3. Khusus bagi Universitas Negeri Gadjah Mada, Pancasila mempunyai kedudukan yang istimewa. Asas kebangsaan menjelmakan tiga jenis pengaruh dalam susunan Universitas Negeri Gadjah Mada, yaitu persesuaian susunan pelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan negara, pada prinsipnya seorang dosen harus warga negara, hanya jika perlu seorang dosen bukan warga negara, dan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran.
4. Bagi Universitas Negeri Gadjah Mada Pancasila sebagai asas filsafat daripada hidup, sebagai asas dan pendirian hidup yang memungkinkan atau menguatkan penentuan sikap dalam

penyelidikan dan pendapat dalam ilmu pengetahuan pada umumnya.

Sebagai tindak lanjut dari seri pertama, Prof. Mr. Drs. Notonagoro kemudian menerbitkan seri yang kedua, yaitu Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Kedua, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia). Prof. Mr. Drs. Notonagoro mengemukakan Pancasila sebagai sudut pandang dalam usaha ilmu pengetahuan memungkinkan orang tidak berpegang pada pendirian “ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan” akan tetapi pada pendirian yang teologis yaitu mementingkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk kebaikan hidup kemanusiaan, tentunya dengan tetap memelihara tugas ilmu pengetahuan yang langsung dan murni yaitu mencapai kenyataan termasuk kebenaran.

Pada tahun 1955, UGM turut mengenalkan Pancasila di dunia internasional. Hal ini tercantum dalam Laporan Tahunan UGM 1955/1956, Prof. Dr. M. Sardjito dalam Konferensi Ranggon, 24-27 Oktober 1955 menyatakan bahwa universitas tidak saja harus memberi kepintaran khusus (jurusan spesialis) tetapi juga budaya yang termasuk juga didalamnya kesusilaan, yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia

juga harus digunakan sebagai dasar dari universitas-universitas di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1957, Prof. Mr. Drs. Notonagoro menerbitkan seri terbitan Pantjasila yang ketiga, "*Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*". Dalam kata pengantar, Prof. Dr. M. Sardjito (Presiden UGM) mengungkapkan bahwa UGM mempunyai tanggung jawab yang berat dalam memberikan penjelasan mengenai Pancasila secara ilmiah kepada masyarakat. Pada seri ketiga ini Prof. Mr. Drs. Notonagoro mengungkapkan bahwa UGM harus melakukan penyelidikan untuk memperoleh pengertian ilmiah daripada Pancasila dan dilakukan usaha penggunaannya yang baik dan bermanfaat serta berbahagia bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, rakyat, masyarakat dan negara. Pada bagian akhir dari terbitan ketiga ini terdapat catatan yang berisi: Naskah "Pembahasan ilmiah tentang pemerintahan Negara Republik Indonesia, dipersembahkan bagi negara dan bangsa oleh pengurus senat dan Senat UGM", pada tanggal 5 Juni 1958 dihaturkan kepada instansi-instansi pusat negara.

Tahun 1959/1960, Rektor UGM kembali menyampaikan tentang keberadaan Pancasila. Rektor UGM, Prof. Dr. M. Sardjito dalam Laporan Tahunan UGM 1959/1960

menegaskan bahwa sejak berdiri UGM senantiasa memberi petunjuk-petunjuk agar Pancasila dapat meresap di hati sanubari para mahasiswanya. Pada tanggal 17 Februari 1959 alumni UGM menyelenggarakan seminar Pancasila dengan menghadirkan pembicara Prof. Mr. Drs. Notonagoro yang menjelaskan secara ilmiah tentang tempat dan kedudukan Pancasila di dalam ketatanegaraan Indonesia.

Tahun 1961, untuk kesekian kalinya Rektor UGM menegaskan kembali tentang Pancasila. Dalam Laporan Tahunan UGM 1960/1961, Prof. Dr. M. Sardjito menegaskan bahwa corak nasional Indonesia yang khas adalah Pancasila. Oleh karena itu, dari dulu kita senantiasa mengusahakan mengisi Pancasila dalam pengertian ilmiahnya dan dalam pengertiannya untuk dipraktikkan, seperti pidato P.J.M Bung Karno menjadi *doctor honoris causa*, pidato-pidato pada seminar Pancasila, dan pidato-pidato yang disiarkan di RRI oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.

Pada 1 Juni 1963, UGM untuk pertama kalinya memperingati hari lahirnya Pancasila dalam rapat senat terbuka dengan pidato peringatan oleh rektor dan pidato ilmiah oleh seorang guru besar. Hal ini tercantum dalam Laporan Tahunan UGM 1962/1963. Namun sayang pada tahun sebelumnya, Fakultas Filsafat dan Umum dihapus, untuk itu tugas dalam bidang indoktrinasi Pancasila/

manipol/usdek dilaksanakan oleh Biro Penjelenggara Kuliah-Kuliah Khusus, dimana biro ini bertugas memberikan penyuluhan kepada:

1. Pegawai tata usaha golongan E dan F di UGM
2. Para dosen Fakultas Teknik, Pertanian dan Kehutanan serta Sastra dan Kebudayaan
3. Para pejabat resmi di Catur Tunggal, Kepala Dinas Niveau Karesidenan dan para Dosen di Fakultas Pertanian di Purwokerto
4. Keluarga Persatuan Wanita Gadjah Mada
5. Para pegawai negeri yang mengikuti kursus di BPA.

Masih melalui tangan Prof. Drs. Notonagoro, S.H. pada tahun 1968 UGM menerbitkan buku Pantjasila secara Ilmiah Populer. Dalam buku ini terdapat tulisan yang menyatakan bahwa Senat UGM mengatakan bahwa:

“Apa yang tercantum dalam Pancasila merawankan hati bangsa Indonesia bahkan penjelmaan daripada cita-rindu-kalbunya. Asas-asas daripada Pancasila meresap dan hidup terpelihara dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai pembangun hidup, yang telah lama berada, Pancasila adalah persifatan dan bentuk baru yang sesuai dengan keadaan daripada ideologi bangsa Indonesia.”

Kemudian pada tahun 1976 melalui proyek PPPT UGM yang

diketahui oleh Prof. Drs. Notonagoro, S.H., UGM menghasilkan laporan penelitian yang berjudul “*Penelitian Serat Centini sebagai Pengupasan Dasar Falsafah Indonesia dalam Rangka Mengisi Makna Pancasila*”. Dalam laporan penelitian ini dijelaskan tentang makna-makna dari lirik/syair dari tembang-tembang Jawa yaitu Sarkara, Sinom, Asmaradana, Dudukwuluh (Megatruh), Kinanthi, Gambuh, Pangkur, Mijil, dan Putjung.

Tahun 1977, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI mengesahkan Statuta UGM. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0233/U/1977 tentang Pengesahan Statuta Universitas Gadjah Mada. Pasal 2 surat keputusan itu menyebutkan:

“Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan tinggi nasional bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya bagi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

Tahun 1983, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan SK No. 86/DIKTI/Kep/1983 tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini biasa disingkat Penataran P-4 Seratus Jam. Program ini merupakan pengganti mata kuliah dasar umum Pancasila, yang memiliki bobot yang setara dengan dua satuan kredit semester (2 sks).

Pada tahun yang sama, 1983, masalah Pancasila diangkat Prof. Dr. Moh. Idris A. Kesuma untuk mendapatkan gelar jabatan guru besar pada Fakultas ISIPOL UGM. Pidato pengukuhan nya berjudul “Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Falsafah Pancasila terhadap Tantangan-Tantangan baik dari Dalam Negeri maupun dari Dunia Internasional”. Dalam pidatonya Prof. Dr. Moh. Idris A. Kesuma menyarankan kepada UGM agar mengadakan penelitian ilmiah mengenai falsafah Pancasila dalam segala bidang ilmu pengetahuan dan juklak-juklaknya.

Tahun 1988, UGM melalui penerus dari Prof. Drs. Notonagoro, S.H. yaitu Sri Soeprpto mengadakan penelitian yang berjudul “*Identifikasi Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila*”. Pada penelitian ini dapat diketahui tentang pemikiran-pemikiran Notonagoro tentang

filsafat Pancasila, pengalaman Pancasila dan penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemudian dikembangkan dan disusun menjadi suatu etika Pancasila bagi bangsa Indonesia. Etika Pancasila merupakan dasar sikap dan citra kepribadian yang dituntut dan yang seharusnya tertampil atau terdapat dalam suatu lingkungan masyarakat.

Tahun 1990, Sri Suprpto melanjutkan penelitiannya yang telah dilakukan pada tahun 1988. Kali ini penelitiannya berjudul “*Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila*”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa etika Pancasila merupakan etika normatif yang objeknya adalah tingkah laku, perbuatan, tindakan manusia Indonesia baik secara individu maupun kelompok ditinjau dari sudut kebaikan menurut nilai-nilai Pancasila.

### **Era 1990-2010**

Statuta UGM tahun 1992 kembali menegaskan Pancasila sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan akademik. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0440/0/1992 tentang Statuta UGM, dalam pasal 2 menyebutkan:

“Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi nasional bertugas membentuk dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya, membina ilmu pengetahuan dan teknologi dan

melestarikan dan mengembangkan secara ilmiah unsur-unsur dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

Tahun 1998, pada saat rakyat Indonesia menuntut reformasi birokrasi, UGM tidak tinggal diam. UGM turut mengawal proses reformasi agar tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah UGM menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “*Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi*” yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1998. Diskusi ini menghadirkan *keynote speaker* Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan judul “*Pancasila: Sumber Inspirasi, Visi, dan Agenda Aksi Reformasi*”.



Rektor UGM, Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. menyampaikan sambutan dalam Diskusi Panel “Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi” (AF4/AM.MS/1998-10A)

Tahun 2003, UGM mengeluarkan laporan penelitian tentang “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila*”. Penelitian ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Ekonomi Pancasila selama Desember 2002 s.d. Mei 2003. Para peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Mubyarto, Edy Suandi Hamid, Hudiyanto, dan Dumairy. Dari laporan penelitian ini dapat diketahui bahwa UGM giat dalam pengembangan Ekonomi Pancasila.

Tahun 2004, UGM menerbitkan buku yang berjudul “*Pancasila Dasar Negara, UGM & Jati Diri Bangsa*”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Dr. Ir. Soekarno, Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Prof. Dr. M. Sardjito, Dr. Mohammad Hatta dan Prof. Dr. Mubyarto. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meneguhkan kembali bahwa sejak berdirinya tahun 1949, UGM bertekad menjadi simbol perjuangan bangsa yang baru merdeka dan berusaha menanamkan jiwa Pancasila kepada semua mahasiswanya melalui kuliah-kuliah *stadium generale*. UGM juga menyelenggarakan kuliah *stadium generale* Pancasila bagi para mahasiswanya yang dicanangkan oleh Rektor UGM pertama yaitu Prof. Sardjito pada Mei 1959.

Untuk memberikan penghargaan kepada Prof. Mr. Drs. Notonagoro, tahun 2006 UGM menerbitkan buku yang berjudul “*Prof. Notonagoro & Pancasila, Analisis Tekstual & Kontekstual*”. Prof. Notonagoro

memberikan inspirasi bagi UGM agar tetap berkomitmen untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan Pancasila dengan mengembangkan Pusat Studi Pancasila dan mengadakan seminar Pancasila. Pada tahun ini tema dies natalis UGM juga berkaitan dengan Pancasila, yaitu *“Revitalisasi Pertanian menuju Bangsa yang Mandiri Bermartabat dan Berdaulat Berdasarkan Pancasila”*.

Pada tanggal 30 Mei-1 Juni 2009, UGM menjadi tuan rumah Konggres Pancasila dengan tema *“Meneguhkan, Mereaktualisasikan, dan Merevitalisasikan Nilai-nilai Pancasila Menuju Terwujudnya Indonesia yang Modern, Demokratis, Adil dan Sejahtera”*, dimana konggres ini merupakan kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi RI. Konggres ini menghasilkan Deklarasi Yogyakarta yang berisi:

1. Pancasila adalah sistem nilai filsafat terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bersama dengan semangat bhineka tunggal ika. Oleh karenanya, segenap komponen bangsa Indonesia wajib menunjung tinggi, menjaga dan membela Pancasila.
2. Sebagai dasar Negara, Pancasila harus menjadi sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur bagi pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari

jenjang tertinggi hingga jenjang terendah dan sekaligus menjadi sumber nilai dan tolok ukur moral bagi seluruh aspek penyelenggaraan Negara.

3. Negara harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkannya dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.
4. Negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara melalui Pendidikan Pancasila kepada peserta didik mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi secara sadar, terencana dan terlembaga dengan saksama.

Tahun 2010, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 06/D/T/2010 tentang Rambu-rambu Strategi Pengembangan Model Pembelajaran dan Evaluasi Hasil Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penyebutan Pancasila dalam Statuta UGM merupakan salah satu wujud penekanan pentingnya ideologi Pancasila sebagai asas UGM. Selain itu, dari berbagai kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh UGM menunjukkan bahwa UGM turut berperan serta dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, wajar apabila UGM disebut sebagai “*Universitas Pancasila*”.

**Sumber:**

1. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitas Negeri Gadjah Mada
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0233/U/1977 tentang Pengesahan Statuta Universitas Gadjah Mada
3. SK Dirjen Dikti No. 86/DIKTI/Kep/1983 tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0440/0/1992 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 19/SK/MWA/2006 tentang Jati

Diri dan Visi Universitas Gadjah Mada

6. SK Rektor UGM No. UGM/87/3966/UM/01/37 tentang Pembentukan Pusat Studi Pancasila UGM
7. Laporan Tahunan UGM 1955/1956
8. Laporan Tahunan UGM 1959/1960
9. Laporan Tahunan UGM 1960/1961
10. Laporan Tahunan UGM 1962/1963
11. Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Pertama, Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.
12. Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Kedua, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.
13. Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Ketiga, Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.
14. Pantjasila secara Ilmiah Populer oleh Prof. Drs. Notonagoro, S.H.
15. Penelitian “Serat Centini” sebagai Pengupasan Dasar Falsafah Indonesia dalam Rangka Mengisi Makna Pancasila oleh

- Prof. Drs. Notonagoro, S.H.
16. Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Moh. Idris A. Kesuma, “Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Falsafah Pancasila terhadap Tantangan-Tantangan baik dari Dalam Negeri maupun dari Dunia Internasional”.
  17. Identifikasi Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila oleh Sri Soeprapto.
  18. Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila oleh Sri Soeprapto.
  19. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila, Pustep UGM.
  20. Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X
  21. Prof. Notonagoro & Pancasila, Analisis Tekstual & Kontekstual oleh Ferry Edwin S., dkk.
  22. Prosiding Kongres Pancasila “ M e n e g u h k a n , Mereaktualisasikan dan Merevitalisasikan Nilai-nilai Pancasila Menuju Terwujudnya Indonesia yang Modern, Demokratis, Adil dan Sejahtera”.